

Pengaruh Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 terhadap Implementasi *Good Governance* (Survey pada Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat di Kota Bandung)

Effect of adoption of SFAS 109 Against the Implementation of Good Governance
(Survey On Badan Amil Zakat and Amil Zakat Institution in Bandung)

¹Ardhiansyah, ²Nurhayati, ³Kania Nurcholisah.

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Bandung

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

e-mail : ¹ardhioded@gmail.com, ²nurhayati_kanom@yahoo.com, ³kania_gunawan@yahoo.com,

Abstract. Zakat refers to a certain amount of property which shall be given by Moslems to people or groups who deserve it (the poor and others) according to Islamic law. In progress of implementation, Zakat Management Organization are growing to meet public demands for accountability, especially to stakeholders and the wider community. Therefore, a standard accounting treatment is required to be used as a reference for both financial reporting, so does implementation and management of zakat according to the sharia rules and refers to SFAS 109 regarding zakat accounting, infaq, and alms. The purpose of this study was to find out about influence of Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (PSAK 109) regarding zakat accounting, infaq, and alms towards implementation of Good Governance in Badan Amil Zakat and Lembaga Amil Zakat. This research was using descriptive and verification methods. Respondents of the questionnaire was the managers of zakat institution who acknowledge about accounting practice in their institution. The analytical method used in this research was simple linear regression. The regression results shows that the implementation of good governance was not good if the application of SFAS 109 was not good either. The coefficient of determination number 62,6% means that 62,6% of good governance implementation determined by Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (PSAK 109) regarding zakat accounting, infaq, and alms while the rest 37,4% determined by other factors that not included in this study. Hence, the influence percentage of Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (PSAK 109) regarding zakat accounting, infaq, and alms toward the implementation of good governance was 62,6%.

Keywords : Zakat, Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat, PSAK 109, Good Governance

Abstrak. Zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan sesuai syariat Islam. Dalam perkembangannya Organisasi Pengelola Zakat semakin berkembang dan masyarakat menuntut untuk adanya pertanggungjawaban khususnya kepada *stakeholders* dan masyarakat luas. Oleh karena itu, itu diperlukan suatu standar dalam perlakuan akuntansinya untuk dijadikan patokan dalam pelaporan keuangan sekaligus untuk pelaksanaan dan pengelolaan zakat yang sesuai dengan kaidah syariah dengan mengacu kepada PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infaq dan sedekah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (PSAK 109) tentang akuntansi zakat, infaq dan sedekah terhadap *Implementasi Good Governance* pada Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Dalam melaksanakan penelitian ini metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode deskriptif dan metode verifikatif. Target responden dari kuesioner tersebut adalah para pengurus yang mengetahui praktek akuntansi pada lembaga yang mereka kelola. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan regresi linier sederhana. Berdasarkan hasil regresi, ketika penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infaq dan sedekah tidak dikatakan baik, maka implementasi *good governance* tidak dapat dikatakan baik. Dengan demikian, koefisien determinasinya adalah 62.6% artinya Implementasi Good Governance sebesar 62.6% ditentukan oleh Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (PSAK 109) tentang akuntansi zakat, infaq dan sedekah sedangkan sisanya 37.4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Sehingga pengaruh Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (PSAK 109) tentang akuntansi zakat, infaq dan sedekah terhadap Implementasi Good Governance sebesar 62.6%.

Kata kunci : Zakat, Badan Amil Zakat, Lembaga Amil zakat, PSAK 109, *Good Governance*

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negeri dengan penduduk muslim terbesar didunia. Penduduk yang beragama islam mencapai kurang lebih 80% dari 220 juta jiwa penduduk indonesia. Selain itu, Indonesia juga adalah negara religius, dalam artian mengakui dan mengakomodasi kehidupan keagamaan penduduknya. Sedangkan islam memiliki ajaran yang menyeluruh yang tidak hanya bertalian dengan persoalan-persoalan ritual saja tapi juga menyentuh aspek-aspek kehidupan yang lain, seperti ekonomi, politik, dan hukum.

Dalam kehidupan ekonomi kita saksikan sendiri permunculan bank-bank nonriba yang memiliki kaidah-kaidah yang tidak bertentangan dengan syariat islam. Kemunculan Bank syariah pertama, Bank Muamalat, yang ternyata masih mampu memberikan bagi hasil positif pada tahun 1998-1999 ditengah kegagalan bank-bank konvensional yang diterpa krisis ekonomi, memberikan sebuah pelajaran akan keunggulan bank syariah. Akuntansi sebenarnya dibutuhkan oleh lembaga keuangan, mau tidak mau mesti merespon perkembangan ini. Maka dikeluarkanlah PSAK nomor 59 yang diperuntukkan kepada lembaga syariah. Tapi ternyata perkembangan tidak hanya sampai itu saja, perkembangan institusi keuangan syariah tidak terbatas pada institusi bisnis, melainkan meluas sampai organisasi nirlaba yang berbasis syariah, yaitu organisasi pengelola zakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah pada Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat di kota Bandung.
2. Bagaimana Penerapan Good Governance pada Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat di kota Bandung.
3. Seberapa Pengaruh Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi 109 (PSAK 109) terhadap Implementasi Good Governance pada Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat di kota Bandung.

B. Kajian Pustaka

Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain (1996:1487), penerapan adalah cara atau hasil. Adapun menurut Lukman Ali (1995:1044), penerapan adalah mempraktekkan, memasang. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi :

1. Adanya program yang dilaksanakan
2. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
3. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut (Wahab,1990:45)

Delapan golongan penerima zakat tidak harus sama persis dalam menerima bagian. Ada delapan golongan (asnaf) yang berhak menerima zakat, yaitu :

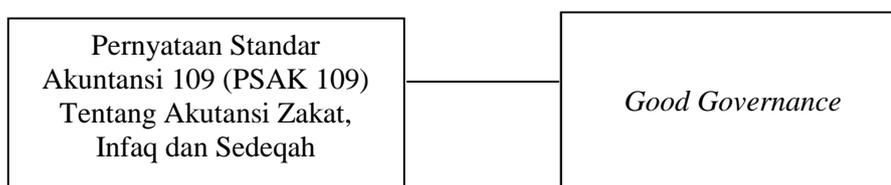
1. Fakir
2. Miskin
3. Amil
4. Muallaf
5. Riqab

6. Gharimin
7. Fii Sabilillah
8. Ibnu Sabil

Beberapa pendapat tentang good governance :

1. World Bank dalam (Mardiasmo,2002:23) ialah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran terhadap kemungkinan salah alokasi dan investasi, dan pencegahan korupsi baik yang secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.
2. UNDP (United Nations Development Program) good governance adalah suatu hubungan yang sinergis dan konstrutif diantara Negara, sektor swasta dan masyarakat.
3. Peraturan pemerintah No 101 Tahun 2000, pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Modul Sosialisasi AKIP (LAN dan BPKP) *good governance* merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan Negara : oleh sebab itu, melaksanakan penyediaan public goods and services. *Good Governance* yang efektif menuntut adanya “*aligment*” (koordinasi) yang baik dan intergritas, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dalam kaitannya dengan ini Bagir Manan menyatakan bahwa “sangat wajar apabila penyelenggaraan pemerintahan yang baik terutama ditujukan pada pembaharuan administrasi negara dan pembaharuan hukum.”



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif verifikatif, dikarenakan adanya variabel-variabel yang akan dijelaskan dan ditelaah hubungannya. Adapun tujuannya untuk menyajikan gambaran secara terstruktur, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar variabel yang diteliti. Metode penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2012:35), adalah untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih variabel (variabel yang berdiri sendiri) tanpa membuat perbandingan dan atau mencari hubungan variabel satu sama lain”.Sedangkan metode verifikatif menurut Sugiyono (2012:11), adalah untuk menguji teori dan penelitian ini akan mencoba menghasilkan informasi ilmiah baru yakni status hipotesis yang berupa kesimpulan apakah suatu hipotesis diterima atau ditolak”.

Populasi penelitian ini adalah Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat di Kota Bandung. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini untuk membuktikan kebenaran dari jawaban yang masih sementara, maka dalam penelitian ini sampel

diambil dengan menggunakan metode probability simple random sampling, yaitu teknik sampling yang dilakukan dengan memberikan peluang atau kesempatan yang sama kepada setiap anggota populasi untuk menjadi anggota sampel tanpa memperhatikan strata yang ada. (Sugiyono,2010).

D. Hasil Penelitian

Uji Normalitas

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (PSAK 109) tentang akuntansi zakat, infaq dan sedekah	Implementasi Good Governance
N		58	58
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	82.9359	83.5117
	Std. Deviation	11.01648	12.33703
	Absolute	.144	.110
Most Extreme Differences	Positive	.100	.053
	Negative	-.144	-.110
Kolmogorov-Smirnov Z		1.100	.835
Asymp. Sig. (2-tailed)		.178	.488

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Pengujian normalitas data menggunakan Test of Normality Kolmogorov-Smirnov dalam program SPSS diperoleh nilai probabilitas sebesar 0.178 dan 0.488. nilai probabilitas > 0.05 maka distribusi dari populasi adalah normal.

Tabel 2. Hasil Analisis Persamaan Regresi Linier Sederhana

Coefficients^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
	(Constant)	10.033	7.657		1.310	.195
1	Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (PSAK 109) tentang akuntansi zakat, infaq dan sedekah	.886	.092	.791	9.680	.000

a. Dependent Variable: Implementasi Good Governance
Keputusan yang diambil adalah sebagai berikut :

H_0 : Tidak ada pengaruh Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (PSAK 109) tentang akuntansi zakat, infaq dan sedekah terhadap Implementasi Good Governance

H_1 : Ada pengaruh Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (PSAK 109) tentang akuntansi zakat, infaq dan sedekah terhadap Implementasi Good Governance

Dasar dari pengambilan keputusan adalah :

- a. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak.
b. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima.

Atau :

- a. Jika $p\text{-value} < 0.05$ maka H_0 ditolak.
b. Jika $p\text{-value} > 0.05$ maka H_0 diterima.

Pada tabel 4.50 tampak nilai t_{hitung} sebesar 9.680. Sedangkan harga kritis nilai t_{tabel} dengan derajat bebas $n - 2 = 58 - 2 = 56$ pada (0.05) sebesar 2.003. Dengan demikian $t_{hitung} (9.680) > t_{tabel} (2.003)$ atau $p\text{-value} (0.000) < 0.05$, sehingga jelas H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (PSAK 109) tentang akuntansi zakat, infaq dan sedekah terhadap Implementasi Good Governance.

Berdasarkan tabel di atas maka diperoleh persamaan :

$$= a + bX$$

$$= 10.033 + 0.886X$$

4.3.1. Koefisien Determinasi (KD)

Berikut ini hasil analisis koefisien determinasi.

Tabel 3. Koefisien Korelasi dan Determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.791 ^a	.626	.619	7.61285

- a. Predictors: (Constant), Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (PSAK 109) tentang akuntansi zakat, infaq dan sedekah
- b. Dependent Variable: Implementasi Good Governance

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa besarnya koefisien korelasi antara Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (PSAK 109) tentang akuntansi zakat, infaq dan sedekah dengan Implementasi Good Governance adalah 0.791 yang menunjukkan hubungan kuat. Hubungan ini arahnya positif artinya apabila Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (PSAK 109) tentang akuntansi zakat, infaq dan sedekah meningkat, maka Implementasi Good Governance juga meningkat atau sebaliknya.

$$KD = r^2 \times 100\% = (0.791)^2 \times 100\% = 0.626 \times 100\% = 62.6\%$$

Dengan demikian, koefisien determinasinya adalah 62.6% artinya Implementasi Good Governance sebesar 62.6% ditentukan oleh Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (PSAK 109) tentang akuntansi zakat, infaq dan sedekah sedangkan sisanya 37.4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Sehingga pengaruh Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (PSAK 109) tentang akuntansi zakat, infaq dan sedekah terhadap Implementasi Good Governance sebesar 62.6%.

E. Pembahasan

Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah

Dengan mengacu pada hasil penelitian badan amil zakat dan lembaga amil zakat di kota Bandung sudah melakukan pencatatan transaksi zakat, infaq dan sedekah sesuai dengan PSAK 109. Hal tersebut di lihat dari indikator penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infaq dan sedekah yang terdiri dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Persentase total skor tanggapan responden atas kesembilan butir pertanyaan yang membentuk dimensi pengakuan sebesar 80,2% dan termasuk dalam kategori baik. Artinya pengakuan akun-akun, atribut pengukuran, informasi pendukung dan penyajian informasi pada badan amil zakat dan lembaga amil zakat di kota Bandung sudah baik.

Persentase total skor tanggapan responden atas ketiga butir pertanyaan yang membentuk dimensi pengukuran sebesar 77,1% dan termasuk dalam kategori baik. Artinya pengukuran menggunakan nilai perolehan dan menggunakan nilai pasar sekarang pada badan amil zakat dan lembaga amil zakat di kota Bandung sudah dikatakan baik.

Implementasi Good Governance

Berdasarkan hasil penelitian badan amil zakat dan lembaga amil zakat dikota Bandung telah melaksanakan lima dimensi dalam implementasi good governance. Hal tersebut dilihat dari skor persentase akumulasi tanggapan responden sebesar 80,7 % termasuk dalam kategori baik. Artinya amil zakat telah menerapkan implementasi good governance dengan baik. Amil zakat menyalurkan dana ZIS dari para muzzaki tepat sasaran dan sesuai dengan presentase yang ada dalam al-qur`an. Zakat yang disalurkan oleh lembaga amil zakat sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut di lihat dari hasil perhitungan dari setiap dimensi yaitu sebesar 80,5 % termasuk dalam kategori tinggi yang artinya program-program yang dibuat badan amil zakat dan lembaga amil zakat yang berhubungan dengan pendistribusian zakat kepada para mustahiq telah dilakukan dengan efektif dan efisien.

Selain itu amil zakat telah membuat laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109 dan laporan keuangan yang telah diaudit tersebut di publikasikan di media masa seperti situs resmi amil zakat. Laporan keuangan yang di publikasikan oleh amil zakat akan memberikan rasa percaya dari para muzaki atas dana yang mereka titipkan dan merupakan bentuk pertanggungjawaban dari lembaga amil zakat bahwa dana yang diamanahkan dari para muzaki disampaikan tepat sasaran kepada para mustahiq.

Pengaruh Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah Terhadap Implementasi Good Governance.

Dengan mengacu pada hasil penelitian, dapat diketahui bahwa hipotesis penelitian yaitu penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infaq dan sedekah memiliki pengaruh terhadap implementasi good governance dapat diterima karena penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infaq dan sedekah berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas publik secara signifikan.

Berdasarkan hasil regresi, ketika penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infaq dan sedekah tidak dikatakan baik, maka implementasi good governance tidak dapat dikatakan baik. Dengan demikian, koefisien determinasinya adalah 62.6% artinya Implementasi Good Governance sebesar 62.6% ditentukan oleh Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (PSAK 109) tentang akuntansi zakat, infaq dan sedekah sedangkan sisanya 37.4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Sehingga pengaruh Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (PSAK 109) tentang akuntansi zakat, infaq dan sedekah terhadap Implementasi Good Governance sebesar 62.6%.

Ketika lembaga amil zakat mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109, maka implementasi good governance amil zakat dapat dikatakan baik. Namun jika lembaga amil zakat tidak menyusun laporan keuangan sesuai PSAK 109 maka implementasi good governance amil zakat belum cukup dikatakan baik. Transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kesetaraan dan independensi dalam mengungkapkan informasi ini merupakan wujud implementasi good governance pada amil zakat.

F. Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

1. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi 109 (PSAK 109) pada Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat dinilai sudah cukup baik. Hal ini berdasarkan persepsi responden terhadap variabel Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi 109 (PSAK 109) pada Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat diperoleh nilai rata-rata jawaban sebesar 3.97 dengan kategori baik.
2. Implementasi Good Governance pada Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dinilai sudah cukup baik. Hal ini berdasarkan persepsi responden terhadap variabel Implementasi Good Governance diperoleh nilai rata-rata jawaban sebesar 4.03 dengan kategori baik
3. Ada pengaruh Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (PSAK 109) tentang akuntansi zakat, infaq dan sedekah terhadap Implementasi Good Governance pada Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Hal ini berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana diperoleh thitung (9.680) > ttabel (2.003) atau p-value (0.000) < 0.05. Besarnya pengaruh Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (PSAK 109) tentang akuntansi zakat, infaq dan sedekah terhadap Implementasi Good Governance adalah 62.6% sedangkan sisanya 37.4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Saran

Berdasarkan hasil analisis pembahasan serta beberapa kesimpulan dan keterbatasan pada penelitian ini, adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini agar mendapatkan hasil yang lebih baik bagi peneliti selanjutnya, yaitu:

1. Dari empat puluh pertanyaan, empat diantaranya memiliki jawaban kurang sesuai terbanyak. Salah satunya pada dimensi penyajian yaitu penyajian laporan arus kas amil. Hendaknya badan amil zakat dan lembaga amil zakat menyajikan laporan keuangan dari per tiga bulan menjadi per satu bulan agar masyarakat dapat dengan mudah mengetahui dana yang sudah disalurkan kepada BAZ dan LAZ di Bandung tanpa menunggu beberapa bulan.
2. Kepada badan amil zakat dan lembaga amil zakat di Kota Bandung, hendaknya lebih meningkatkan profesionalisme karyawan karena untuk meningkatkan kinerja manajerial badan amil zakat dan lembaga amil zakat di Kota Bandung.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian sejenis, disarankan untuk meneliti tidak hanya mencakup implementasi good governance saja atau menambahkan prinsip good governance yang tidak ada dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Bungin Burhan, *Metodoogi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta, Kencana, 2009, hlm. 105
- Departemen Agama Reublik Indonesia. 1971. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an.
- Departemen Agama Republik Indonesia.1999. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Jakarta: Depag RI
- Fadilah, Sri. 2011. *Pengaruh Implementasi Pengendalian Intern dan Total Quality Management terhadap Penerapan Good Governance*. (Studi pada Lembaga Amil Zakat Seluruh Indonesia). Symposium Nasional Akuntansi XIV Aceh 2011: Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
- Forum Zakat. 2005. *Pedoman Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: Forum Zakat
- Husein Syahatah. 2004. *Akuntansi Zakat: Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer*. Jakarta : Penerbit Pustaka Progressif.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2008. *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan no.109 tentang akuntansi zakat, infaq dan sedekah*. Jakarta: IAI
- Imam Ghozali. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kartika Sari, Elsi. 2007. *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo.
- Kholmi, Masiyah. 2012. *Akuntabilitas dan Pembentukan Perilaku Amanah dalam Masyarakat Islam*. Jurnal Studi Masyarakat Islam. Volume 15 Nomor 1: 63-72.
- Kurnia Hikmat, Hidayat A. 2008. *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta : Qultum Media.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Muhammad. 2005. *Pengantar Akuntansi Syari'ah*. Jakarta: Salemba Empat
- Nurhayati, Sri & Wasilah. 2009. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.

Nurhayati, Sri, Wasilah. 2009 . *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Edisi II). Jakarta : Salemba Empat.

Sekaran, Uma. 2006. *Research Method For Business*. Edisi 4 (Edisi Bahasa Indonesia). Buku 1 dan Buku 2. Jakarta: Salemba Empat

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D)*. Bandung : Alfabeta.

Tapanjeh-Abu, Abdussalam Mahmoud. 2009. *Corporate Governance from the Islamic Perspective: A Comparative Analysis with OECD Principles”, Critical Perspectives on Accounting, 20*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Internet :

<http://prosiding.lppm.unisba.ac.id/index.php/sosial/article/viewFile/159/97>

www.baznas.or.id

www.rumahzakat.org

<http://dpudt.daaruttauhid.org/>

<http://www.dompethuafa.net/>

<http://pkpubandung.blogspot.com/>

<http://www.percikaniman.org/>

<http://pzu.or.id>

<http://blog.stie-mce.ac.id/istutik/2011/05/04/bagaimana-bentuk-laporan-keuangan-amil/>

<http://rumahsalman.org>